



PILKADA DALAM BINGKAI DEMOKRASI DIGITAL

KUMPULAN OPINI SEKOLAH PEMANTAU PILKADA KISP 2020

KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA DALAM MENGAWAL PILKADA DI ERA DIGITAL

Oleh: Ahsan Taqwim Al-Akid

Berbicara mengenai tema menakar iklim demokrasi digital di pilkada 2020, maka disini saya akan membawakan judul yaitu penggunaan dan pemanfaatan media dalam mengawal pilkada di era digital. Oleh sebab itu dengan adanya tema tersebut kita juga tidak terlepas dari penggunaan media digital pada demokrasi di era digital saat ini. Pada masa atau era seperti sekarang ini tentunya kita sudah mengetahui bahwa dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi digital di dunia ini sangat maju dengan pesat, dan saat ini ddalam system dunia sudah memasuki era industry 4.o. Yang dimana dalam pelaksanaan pengelolaan ekonomi, social, maupun pendidikan dunia menggunakan teknologi, tentunya teknologi digital. Oleh sebab itu dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat maka kita sebagai generasi muda millennial juga perlu mengetahui peran media dalam demokrasi di era digital seperti saat ini. Menilik makna media digital sendiri maka media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital, media digital disini juga bisa berupa website, media social, gambar, dan video digital, audio digital, dan lain-lain. Berbicara mengenai penggunaan media dan pemanfaatan media dalam demokrasi era digital, maka kita juga perlu mengetahui peran media dalam mendukung demoktrasi digital dan pilkada 2020.

Berdasarkan pemampanan A.Riyadi (Kepala Biro TIMES Yogyakarta Indonesia), yaitu ada beberapa elemen yang berperan melalui media digital dalam mengawal pilkada 2020 yaitu, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan tentunya elemen masyarakat/akademisi. Kemudian dalam penggunaan dan pemanfaatan media dalam mengawal pilkada di era digital juga perlu akurasi dan kelayakan berita yang disampaikan melalui media kepada public atau civil society, berikut adalah beberapa indikator kelayakan niai berita atau informasi terkait pilkada menurut A.Riyadi selaku Kepala Biro TIMES Yogyakarta Indonesia, yaitu pertama ada Magnitude : Pengaruh peristiwa bagi publik, Significance : Penting Tidaknya Bagi Publik, Actuality : Hangat, akan, sedang, atau baru terjadi, Proximity : Kedekatan Secara Geografis dan Psikologis dengan pembaca, Prrominence : Popularitas, Keterkemukaan, atau ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa, Human Interest : Menyentuh Perasaan Kemanusiaan Khalayak, Unique : Keanehan, Ketidaklaziman, kemudian secara Conflict : Politik Uang, Adu Argumen, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut maka memang ada indikator-indikator untuk menentukan layak atau tidak sebuah informasi atau berita tersebut untuk disampaikan ke masyarakat baik melalu media digital atau media non-digital. Dalam pembahasan terkait dengan media ini maka pada era modern, era digital seperti saat ini, media digital bisa lebih efektif digunakan terutama pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Karena saat ini peran media digital begitu kuat dan lebih efektif, seperti berita akan cepat menyebar luas, jangkauan tersebarnya akan lebih luas tidak hanya di daerah tertentu saja namun luar daerah hingga mancanegara, tak terbatas space, mudah di share atau disebarluaskan, untuk biaya cenderung lebih murah dan untuk waktu lebih efisien, informasi akan lebih mengena ke pembaca atau ke

masyarakat. Maka dari itu media digital memiliki peran yang sangat strategis dalam pilkada 2020 ini, apalagi pemerintah membatasi orang untuk berkerumun karena covid-19 ini, akan tetapi hal tersebut juga tergantung pada penggunaan atau pengelola media dan masyarakat yang mengambil dan mencari sumber informasi.

Kemudian tentang penggunaan dan pemanfaatan media digital ini juga menjadi tugas kita bersama sebagai generasi muda millennial untuk berperan dalam proses demokrasi Indonesia di era digital terutama saat pandemic covid-19 saat ini terutama untuk mengelola atau menggunakan media digital dengan sebaik-baiknya untuk member informasi atau berita dan memberi pengetahuan kepada masyarakat atau publik terkait dengan pilkada 2020 ini. Dan untuk menjaga demokrasi digital maka yang perlu dilakukan adalah kegiatan literasi media. Dalam literasi media juga memerlukan skill kritik oleh pembaca atau publik, juga produksi tampilan media, lalu konteks sosepol-etik industry media, dan juga analitis krisis media. Kemudian menurut Fajar Junaedi (Dosen UMY) menjelaskan bahwa dalam berkampanye social kita harus cerdas bermedia, dan harus pandai pilah dan pilih mana yang hoax dan tidak, dan juga lawan dan cegah hate speech. Kemudian dalam hal ini Iqbal Khatami (Presiden Mahasiswa UMY 2019-2020) mengatakan internet sebagai ruang yang baru di demokrasi digital. Karena dalam hal ini internet dimaksudkan sebagai gudang informasi, akses terhadap informasi tidak hanya menjadi hak dasar warga namun juga menjadi sebuah prasyarat dalam demokrasi itu sendiri. Namun ada tantangan tersendiri dalam penggunaan media digital ini, internet memiliki dua sisi, kelebihan dan kelemahan, menurut Papacharissi (2010) teknologi informasi dapat meningkatkan potensi untuk berpartisipasi dalam debat politik, namun pada faktanya warga-net lebih memilih menjadi konsumen informasi daripada menghasilkan informasi. Oleh sebab itu perlu sekali perlibatan partisipasi dari masyarakat. So, maka dari itu kita sebagai generasi muda millennial mari kita bersama-sama memanfaatkan dan mengelola media digital dalam rangka untuk berproses dalam demokrasi kita di era digital saat ini terutama dalam pelaksanaan pilkada 2020, dan juga mengajak elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan peduli dalam pilkada 2020 guna demi tercapainya Negara yang demokratis, walaupun keadaan saat ini kita berada di tengah pandemi covid-19 ini, namun kita harus tetap berperan dan berpartisipasi guna untuk mewujudkan demokrasi politik yang ideal.

PEMAKSIMALAN PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PILKADA 2020

Oleh: Anneke dwie Prasasti

Seperti biasanya kegiatan pilkada yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia merupakan suatu kegiatan besar bangsa yang demokrasi. Ini merupakan pesta seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan demokrasi bangsa. Tidak jarang kegiatan ini harus mengumpulkan banyak massa pada satu tempat seperti kampanye dan kegiatan edukasi lainnya. Namun, berbeda pada tahun ini dikarenakan terdapat wabah virus covid-19 kegiatan yang harus melibatkan banyak orang tidak diperkenankan lagi. Hanya kegiatan tertentu yang diizinkan tetapi tetap menjalankan protocol Kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Makadari itu diperlukan strategi demi berjalannya tahapan-tahapan pilkada 2020 ini. Yang paling berpengaruh saat ini adalah penggunaan media social sebagai bentuk dari penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Tanpa adanya kampanye dengan mengumpulkan banyak massa dirasa mustahil pilkada 2020 dapat berjalan lancar, namun nyatanya dengan berbagai platform yang telah disediakan pilkada tetap dapat berjalan secara kondusif. Penggunaan berbagai platform ini juga bukan hanya sekedar penyebar informasi kepada masyarakat diharapkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pilkada 2020 seperti memantau jalannya partai politik atau sebagai pemberi pendapat bagi jalannya pilkada 2020 yang lebih sukses.

Penggunaan internet sebagai platform berpolitik juga di dasarkan pada beberapa hal antara lain internet menjadi sebuah media baru yang lahir di dunia karena merupakan inovasi dan campuran antara media cetak, audio, serta video yang mampu menawarkan komunikasi dua arah. Siapapu berhak dalam penggunaannya. Indonesia juga sebagai salah satu dari 10 negara dengan penggunaan internet terbesar. Tidak heran jika penyebaran berita akan cepat sampai ke seluruh negeri.

Sebagai platform yang paling besar dan paling mudah di akses oleh seluruh kalangan masyarakat sudah seharusnya kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi peserta pemilu dapat lebih aktif lagi dalam berinteraksi dengan masyarakat seperti menggunakan platform Instagram sebagai perkenalan diri sesuai dengan aturan kampanye yang telah ditentukan, sebagai sarana informasi jika diadakan kegiatan-kegiatan dari partai. Dari segi masyarakat dapat digunakan sebagai cara mencari informasi profil kandidat yang akan dipilih, seperti biografi, visi misi dan Riwayat berpolitik.

Dengan penggunaan internet dapat menarik banyak kalangan muda dalam berpartisipasi menyukseskan pilkada 2020 seperti pengadaan sekolah-sekolah pilkada atau organisasi pemantau pilkada. Diyakini dengan dilaksanakan secara online diyakini dapat lebih banyak menarik massa.

Bagi pemerintah sebagai pemantau jalannya pilkada 2020 dapat digunakan sebagai sarana diskusi sekaligus pemantau bagi para kandidat. Kegiatan rapat dapat dilaksanakan secara online tidak jarang juga melibatkan masyarakat. Dengan kegiatan secara online sebagai

bentuk penerapan aturan pemerintah dengan protocol Kesehatan covid-19. Kegiatan secara offline mungkin akan dilakukan dengan persyaratan tertentu dan pastinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Untuk pilkada 2020 kemungkinan akan dilaksanakan secara offline tetapi dengan menerapkan 9 hal baru yang ada di TPS demi meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Pesta demokrasi tahun 2020 akan bisa dilaksanakan jika semua aturan dan prosedur berjalan dengan baik. Akan banyak sekali rintangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pilkada tahun ini salah satunya yang sangat sulit dihindari adalah penyebaran hoax. Dengan demikian harus adanya sosialisasi kepada masyarakat jika pesan yang diterima bukan dari lembaga resmi pemerintah jangan mudah percaya. Pemerintah juga harus menyebarkan informasi dengan menggunakan platform resmi Lembaga negara secara sah. Akan ada sanksi bagi penyebar hoax dan dapat terkena pidana.

Diharapkan masyarakat dan pemerintah tetap bijak dalam penggunaan internet sebagai sarana berpolitik. Sebagai sarana saling mengawasi jika terdapat pelanggaran di dalamnya karena Lembaga seperti BAWASLU menerima pengaduan pelanggaran yang terdapat dalam pilkada 2020. Semoga penggunaan internet ini sebagai bentuk Demokrasi digital yang sukses dalam pilkada 2020.

MENAKAR IKLIM DEMOKRASI DIGITAL DI PILKADA 2020

Oleh: Eko Sujarno

ERA internet, dituding oleh penulis *The Death of Expertise* (2017), Tom Nichols, sebagai biang keladi matinya kepakaran. Menurutnya, internet membuat orang-orang menjadi sok tahu dan mengklaim mengetahui segalanya. Hanya bermodal selancar di **dunia maya** selama lima hingga sepuluh menit perhari, sembari membaca baris-baris judul berita, hal itu mendadak membuat orang awam “berwawasan”, mengerti setiap pokok persoalan, dan dapat menyelesaikan masalahnya sekaligus. Tidak jarang, orang-orang ini merasa lebih andal dari para ilmuwan, bahkan para ulama. Kalangan ini jauh lebih berisik di lini masa, mereka menyerang siapa saja yang berbeda pendapat. Banjir selalu membawa wabah penyakit, begitu pun dengan kelebihan geyuran informasi di era media sosial. Alih-alih membuat masyarakat semakin bijak, media sosial malah membuat penggunanya semakin jahat.

Gempuran informasi membuat kita tidak dapat memilah antara berita fakta dengan fiktif, tidak mampu memilih mana informasi substansial dan mana yang sekadar sensasional, atau kikuk memihak antara pesohor atau pakar untuk dijadikan referensi. Fenomena ini terbukti di acara-acara seminar yang terlalu sering mengundang selebriti ketimbang praktisi atau akademisi ahli. Pada ekosistem kepakaran masing-masing, para ulama dan ilmuwan mulai resah dengan situasi tersebut. Saat ini, bukan lagi zaman yang mempolemikan posisi intelektual di luar dan di dalam lingkaran kekuasaan atau bersiteru antara intelektual generalis dengan intelektual spesialis. Karena **komunitas intelektual** masa kini lebih mengeluh dengan eksistensi orang-orang bebal yang mengaku hebat, tapi tidak mampu berdebat dengan sebenarnya menggunakan akal sehat di ruang publik virtual.

Ruang publik virtual sudah tidak menjadi ruang dialog antargagasan. Demokrasi virtual telah menjelma menjadi arena gladiator yang membebaskan para pertarungannya untuk saling membunuh dengan segala cara dan senjata, dengan menggugurkan etika. Situasi ini semakin diperparah oleh para intelektual publik yang malah terlalu sibuk berdiskusi tentang kebebalaan masyarakat yang kian akut ketimbang ikut memperbaikinya. Kelompok ini, makin asik dengan komunitasnya sendiri tanpa ikut terlibat percakapan publik yang semakin tidak baik-baik saja.

Kekosongan peran tersebut, akhirnya diisi orang-orang bebal yang kebetulan cukup populer. Yang pada akhirnya, kualitas keilmuan dapat dikalahkan dengan jumlah *followers* atau *subscriber* di media sosial. Sangat menyedihkan, di era ini kepakaran tunduk di hadapan ketenaran. Dan, memang pada faktanya intelektual publik kita masih lemah berlelgang-lenggok di panggung digital dan terlihat semakin gugup berkomunikasi dengan warganet. Mereka kalah nyaring di media sosial, dan mudah diringkus oleh para *buzzer*, *influencer* dan *marketer* yang rajin memobilisasi opini publik dengan *gimmick*, bukan rasionalitas.

Masyarakat dikondisikan untuk lebih senang dihibur ketimbang diberi pengetahuan. Kewarasan masyarakat kini tersandera dengan yang viral, terseret oleh sensasi, terpuruk karena paranoid konspirasi. Situasi ini ulah dari kelompok-kelompok yang terlalu sering menganggitasi emosi ketimbang mengadvokasi nalar publik. Menurut teori efek Dunning-Kruger, semakin bodoh Anda, semakin yakin kalau Anda tidak bodoh. Mungkin terdengar konyol, namun coba direfleksikan pada kasus Dr Bernard Mahfoudz yang membeberkan **sisi gelap vaksin** yang terlihat tidak masuk akal, namun tidak butuh waktu lama gagasan itu meraih banyak dukungan dan pengikut dengan jumlah yang luar biasa dari para warganet di Indonesia.

Tidak hanya dari masyarakat umum, mereka yang berpendidikan tinggi pun percaya dan membela sepenuh hati padangan konyol tersebut. Tidak perlu waktu lama, para pendukung DR Bernard Mahfoudz harus menelan ludah, karena ternyata informasi tersebut adalah hoaks. Dr Bernard Mahfoudz ternyata bernama Jhonny Sins, seorang bintang film dewasa yang telah bermain ratusan ribu judul film porno. Sontak hal tersebut menjadi bahan lelucon yang cukup menyita perhatian publik. Kenapa bisa terjadi? Menurut Tom Nichols, inilah yang dinamakan bias konfirmasi. Secara alamiah individu hanya ingin menerima fakta, data dan informasi yang membenarkan keyakinannya sekaligus menolak pengetahuan yang bertentangan dengan kepercayaannya. Hal ini dapat kita refleksikan pada kasus lainnya seperti operasi plastik [Ratna Sarumpaet](#), poligami Eyang Subur, cetak uang Kanjeng Dimas Taat Pribadi, tujuh kontainer surat suara [Andi Arief](#), dan isu politik yang marak di 2019 ini. Yang masing-masing, punya pendukung fanatik dan pembela yang membabi buta, tentunya sama-sama keras kepala.

Karena yang bagi orang-orang bebal ini, mereka lebih membutuhkan konfirmasi yang menguatkan posisinya ketimbang kebenaran informasinya. Hal itulah yang tidak disadari akan membuat masyarakat kian bebal. Masyarakat bebal adalah situasi masyarakat yang tidak mau berbuat dan bertindak benar. Situasi ini makin lestari dan berkembang biak setiap hari, karena *groupthink symptoms*, afiliasi politik, **mobilisasi SARA**, dan jebakan algoritma yang memberikan kekuatan orang-orang tersebut untuk menjadi kian dikultuskan di lini masa.

POLARISASI, DIGITALISASI DAN DEMOKRASI

Oleh: Irham Bugis

Kerasnya polarisasi politik dalam demokrasi digital ini dapat kita rasakan dalam Pemilihan Presiden RI 2019 kemarin. Indonesia seakan terpecah menjadi dua golongan besar dengan istilah “kampret” dan “cebong”. Demikian juga dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Kasus dugaan penistaan Alquran yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta misalnya, bisa menjadi contoh bagaimana elite-elite politik yang berkepentingan memobilisasi massa melalui kampanye di jejaring media sosial (dunia digital). Mereka mampu menggerakkan solidaritas berbasis identitas keagamaan itu lintas daerah bahkan lintas pulau untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.

Terlepas dari bagaimana kepentingan elite diartikulasikan dalam kasus itu, demokrasi digital ini nyata kita hadapi bahkan sering kali dengan perasaan waswas akan dampak buruk dan konflik horizontal yang mungkin saja terjadi. Sekalipun kita telah memiliki UU ITE sebagai instrumen hukum, siapa yang bisa mengontrol kebebasan berpendapat atau provokasi yang setiap detik direproduksi di jagat maya kita? Demokrasi kita pun masuk fase transisi sekaligus fase ujian bagi kematangan publik dalam berdemokrasi itu sendiri.

Untuk Indonesia, tentu saja profil demografis netizen tidak perlu ditambah dengan variabel geografis kewilayahan. Desa dan kota, atau Jawa dan luar Jawa. Berbeda dengan negara maju, Indonesia masih mengalami kesenjangan digital level pertama, di saat infrastruktur jaringan masih belum benar-benar merata dengan kualitas yang sama baik. Jaringan internet masih terkonsentrasi di perkotaan. Meskipun begitu semangat dalam memproduksi hoaks dalam dunia demokrasi yang digital tidak kalah serunya dengan kecepatan internet di daerah luar Jawa. Di Maluku misalnya, Pemilihan gubernur Maluku tahun 2018 yang lalu juga beredar berbagai macam isu, yang mengarah pada isu-isu SARA.

Dalam demokrasi digital, media percakapan dan rapat tatap muka itu telah digantikan perangkat telepon pintar yang menghapus hambatan sekat dan jarak. Orang terhubung dan teralienasi sekaligus dengan sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Persis seperti demokrasi ala pilkada ditahun 2020 ini, di saat kemenangan politisi akan sangat ditentukan dengan kemenangannya merebut simpati netizen, bahkan dari netizen yang tidak memiliki hak pilih sekalipun. Suara pemilih tidak lagi terbatas pada ruang administratif kependudukan karena opini pemilih bisa sangat dipengaruhi respons dari warga di luar arena pertarungan.

Meski demikian, spekulasi dalam demokrasi digital ini semakin terukur dan secara ekonomi semakin efisien. Sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia beruntung memiliki Pancasila yang menjadi dasar dalam berdemokrasi. Jika mampu melewati polarisasi demi polarisasi politik sebagai keniscayaan demokrasi digital ini, kita akan bergerak lebih maju.

Kencangnya isu SARA dalam konteks demokrasi digital harus disikapi sebagai hal yang wajar. Ia akan selalu muncul, sebab internet merupakan media dan saluran yang sangat

terbuka. Demokrasi digital ialah era di saat semua suara bisa didengarkan dan direspons. Era di mana urusan privat bisa dengan cepat menjadi konsumsi publik dan begitu pula sebaliknya. Layaknya ciri orang kota, demokrasi digital akan senantiasa sibuk, macet, dan tidak pernah tidur.

DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA DARING DALAM PILKADA 2020

Oleh: Jamaluddin

Pada era perkembangan demokrasi digital saat ini, kehadiran media daring memberikan kemudahan bagi pasangan calon dan tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program serta pencitraan politik lainnya kepada masyarakat sebagai calon pemilih, kapanpun dan dimanapun berada. Penggunaan media daring ini memberikan dampak terhadap efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam aktifitas pilkada yang berlangsung.

Sejarah penggunaan media daring dalam pemilu mulai dikenal oleh publik pada tahun 2008, ketika itu Obama sebagai salah satu calon Presiden Amerika membuat sejarah baru dalam berkampanye dengan memanfaatkan media daring, Obama aktif menggunakan media sosial untuk meraih simpati dan dukungan. Keberhasilan penggunaan media sosial dalam pemilu presiden di Amerika Serikat diadopsi dan ditiru oleh tim kampanye pemilu presiden tahun 2014 silam dan pola kampanye ini kemudian semakin berkembang penggunaannya dalam pemilu maupun pilkada hingga ke daerah-daerah sampai dengan saat ini. Kehadiran media sosial sebagai sarana propaganda politik dalam berkampanye menjadikan Pilkada lebih semarak dan bergairah.

Sebelum pelaksanaan kampanye dimulai seperti saat ini, adu kekuatan dan strategi sudah mulai terlihat di media daring. Semua calon memanfaatkan ruang media sosial untuk saling unjuk diri agar terlihat lebih mumpuni dan berkualitas dari yang lain. Media sosial memang memiliki daya *magic* yang luar biasa pada kehidupan politik saat ini. Misalnya, seorang calon kepala daerah yang belum dikenal oleh publik atau belum populer mampu disulap menjadi sosok yang spektakuler. Bahkan seseorang yang awalnya hanya biasa-biasa saja, dalam seketika dengan sentuhan dan polesan pencitraan media sosial menjadi terlihat sangat *digjaya*, dan begitu juga sebaliknya, semua bisa redup dan punah dalam seketika karena permainan politik kebencian, fitnah, *black campaign* yang dilancarkan melalui media sosial.

Pesatnya perkembangan media daring saat ini dikarenakan semua orang seakan-akan bisa memiliki media sendiri tanpa batas. Media sosial merupakan sebuah media daring yang digunakan untuk bersosialisasi satu dengan yang lain yang memungkinkan setiap orang saling berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Namun demikian, kemudahan ini juga sekaligus membuka celah bagi siapa saja untuk mengotori proses demokrasi diajang pilkada ini dengan memboncengi media sosial. Oleh karenanya, yang dibutuhkan bukan hanya pencegahan dan penindakan terhadap kemungkinan disalahgunakannya media sosial dalam berkampanye, melainkan juga harus dilakukan pendidikan politik yang mencerdaskan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap pemilik akun dan pengguna media sosial itu sendiri. Terkait hal ini, tentu saja menjadi tanggungjawab bersama antara Penyelenggara, Pasangan Calon, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Regulasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni Undang-Undang No. 10 tahun 2016 telah mengatur secara jelas, pada Pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa kampanye

dilaksanakan sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kemudian pada pasal 64 ayat (3) juga menjelaskan bahwa penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Secara normatif, hal-hal yang dilarang dalam kampanye melalui penggunaan media sosial antara lain; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik. Dan juga dilarang melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Media sosial saat ini juga mempunyai fungsi sebagai ruang publik, sehingga mewajibkan kepada penggunanya untuk menjaga etika (*netiquette*) dalam berkomunikasi menggunakan media sosial. Banyak aturan yang telah mengatur, tidak hanya undang-undang dan peraturan terkait dengan pilkada tetapi ada juga aturan tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Penggunaan media daring dalam pilkada memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kampanye dan propaganda politik lainnya kepada calon pemilih. Hal ini diharapkan mampu memberi edukasi politik yang baik bagi masyarakat dengan mengedepankan etika dan kepatutan, dan tidak menjadikan media daring ini sebagai sarana untuk saling “menelanjangi” antar pasangan calon peserta pilkada.

Semoga kita bijak dan cerdas memainkannya.

PERAN MEDIA MASSA DALAM PROSES DEMOKRASI

Oleh: Nahdatul Wahdania C.

Media massa semakin berperan secara dinamis dalam proses demokrasi, utamanya menjembatani pendapat public melalui social media secara masif. Tak hanya berperan sebagai penghubung pendapat satu sama lain, social media seringkali digunakan sebagai platform untuk berkampanye karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan melakukan kampanye secara langsung. Salah satu media baru yang sangat digemari oleh masyarakat, utamanya anak muda atau kaum milenial adalah social media. Sosial media menjadi platform baru yang diyakini oleh banyak orang dapat menjadi sarana informasi secara dua arah atau timbal balik, berbeda dengan media massa lainnya seperti media cetak, radio, dll yang hanya memberikan informasi secara satu arah.

Beberapa tahun terakhir, sosial media diakui berhasil memberi banyak keuntungan dalam berbagai aspek, satu diantaranya yakni terhadap aspek demokrasi. Adapun beberapa keuntungan dari social media yakni meningkatkan partisipasi kaum muda sebagai pemilih yang seringkali dianggap acuh terhadap kegiatan kepemiluan. Dengan kemudahan dalam mencari tahu informasi serta proses yang tidak membutuhkan waktu yang lama, social media berhasil meningkatkan partisipasi kaum muda. Akhir-akhir ini, social media menjadi platform yang sangat digemari untuk melakukan diskusi, karena kemudahan dalam penggunaan serta tidak membutuhkan biaya tambahan, terlebih lagi di tengah pandemic covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi interaksi satu sama lain. Keuntungan lain dari penggunaan social media yang erat kaitannya dengan proses demokrasi adalah dengan social media, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengutarakan pendapat atau opini, serta membuka ruang public yang memudahkan masyarakat untuk memberi kritik, saran atau masukannya terhadap pemerintah. Adapun social media yang sering digunakan sebagai media untuk menyuarakan pendapat yakni Facebook, Twitter dan Instagram.

Namun sayangnya fenomena tersebut tidak hanya memberi keuntungan, melainkan juga diikuti dengan kerugian. Salah satu dampak buruk yang timbul akibat penggunaan social media yakni banyak bermunculan hoax atau berita yang tidak valid. Kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses social media ternyata disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk menyebarluaskan hoax, sehingga diperlukan ketelitian dalam mencari informasi di social media. Disamping itu, dengan lahirnya UU ITE pada tahun 2008, maka setiap pengguna social media harus bijak dalam penggunaannya sebab tak jarang seseorang dituntut karena dianggap melanggar UU ITE. UU ITE sendiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seringkali UU ITE disebut sebagai pasal karet karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Dengan adanya UU ITE, kebebasan berpendapat setiap orang seketika dibatasi yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan system demokrasi di Indonesia yang seharusnya memberi dan menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk berpendapat.

Beberapa bulan mendatang, Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yakni Pilkada Serentak yang diselenggarakan di 270 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. Hal menarik dari kontestasi politik mendatang yakni kegiatannya yang diselenggarakan di tengah pandemic covid-19. Jika normalnya berbagai kegiatan pilkada dilaksanakan dengan melibatkan banyak

orang, justru berbeda dengan pilkada mendatang yang melimitasi jumlah peserta yang hadir agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, untuk tetap menghidupkan nuansa pesta demokrasi, upaya yang dilakukan yakni dengan memaksimalkan peran media massa dalam kontestasi politik mendatang. Ddidukung dengan optimalisasi penggunaan social media, hal tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan partisipasi kaum muda sejak dini, dengan tujuan untuk menciptakan pesta demokrasi yang ideal. Dan juga, mengingat bahwa beberapa tahun mendatang Indonesia akan menikmati bonus demografi yakni dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif, maka diharapkan partisipasi pemilih muda terus meningkat.

SIAPAKAH PILKADA SERENTAK 2020 DI ERADIGITALISSI?

Oleh: Ridho Sudrajat

Teknologi informasi telah mengubah berbagai cara dalam berdemokrasi. Belakangan kemudian muncul istilah demokrasi digital, di mana setiap aktivitas warga negara atau politik yang menggunakan jejaring internet diidentikkan dengannya. Demokrasi digital bukanlah model demokrasi baru. Demokrasi digital adalah tentang bagaimana teknologi informasi mengubah praktik demokrasi menjadi lebih baik. Ada beberapa karakter yang melekat, di antaranya adalah sifatnya yang interaktif dan proses komunikasi yang bersifat resiprokal, di mana semua warga negara bisa berdialog secara interaktif.

Akan tetapi, di samping membawa pengaruh positif, kehadiran demokrasi digital juga menyodorkan persoalan serius terkait dengan perilaku para netizen itu sendiri. Adanya meme, pesan viral, trolling, ataupun cyber-bullying adalah bentuk nyata yang sekarang terus menjadi masalah dalam membangun demokrasi digital yang lebih berkualitas. Karakter anomus sering menjadi faktor potensial yang mengarah pada munculnya gejala demokrasi nothing, atau demokrasi yang tidak lebih sekadar keriuhan penuh pergunjungan politik. Penggunaan internet untuk kampanye dalam Pilkada misalnya, sering kali lebih mengedepankan sisi buruk dari masing-masing pribadi para calon, ketimbang misalnya adu program. Internet melalui media sosial dan jurnalisme online misalnya, lebih banyak digunakan untuk saling menyerang dengan menghembuskan isu primordial seperti sentimen agama, ras, etnis, dan privasi. Oleh karena itu demokrasi digital semakin eksekif yang kurang produktif untuk membangun demokrasi politik secara lebih substansial. Sejumlah pertanyaan mendasar dapat disodorkan, bagaimana dinamika demokrasi digital dalam Pilkada serentak 2017? Apakah mengarah pada pelaksanaan kampanye rasional yang mengedepankan program, atau riuh rendah di seputar isu primordial yang saling merendahkan. Apakah kaum netizen akan mengedepan debat publik yang konstruktif, atau ikut terseret dalam tarik-menarik praktik kampanye hitam. Lalu bagaimana negara seharusnya harus mengantisipasi kecenderungan demokrasi digital yang destruktif, sehingga dapat meminimalisir eksek negatifnya untuk mengembangkan demokrasi digital yang lebih produktif dan konstruktif bagi kehidupan politik. Untuk itu sejumlah topik akan dielaborasi melalui tulisan-tulisan kritis di seputar isu makin maraknya demokrasi digital. Harapannya, agar pelaksanaan Pilkada serentak menjadi bagian dari proses pembelajaran politik warga yang produktif dan kedewasaan berpolitik.

KPU telah merancang beberapa mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) menjadi digital, salah satunya tahapan kampanye yang akan dilakukan secara digital alias *digital campaign*. Hal ini, menurutnya untuk mencegah pertemuan banyak orang yang biasanya terjadi setiap diselenggarakannya kampanye pilkada. Meskipun rancangan tersebut masih akan dibahas dan dikonsultasikan KPU dengan pemerintah dan DPR, sebagai sebuah diskusi alternatif penyelenggaraan pemilu di masa seperti sekarang ini, saya kira sangat relevan. Seperti kita alami bersama, pandemi Covid-19 telah mengubah hampir semua mekanisme pertemuan menjadi online atau digital, seperti misalnya rapat online, diskusi online, wisuda online, belajar online, ibadah online dan sebagainya. Konsekuensi pertama dari

keputusan tersebut adalah soal ketimpangan akses internet. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports yang dilansir akhir Januari 2020", menyebutkan baru 64% atau sekitar 175,4 juta masyarakat Indonesia menggunakan internet. Pada Mei 2019, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menyebutkan angka pengguna internet di Indonesia tidak jauh berbeda, yakni 64,8%. Selain itu, APJII juga menunjukkan data penetrasi internet pada rentang usia 5-9 tahun hingga rentang 65 tahun ke atas. Data menunjukkan rentang usia 15-19 tahun tertinggi penetrasinya yaitu mencapai 91%. Sementara penetrasi terendah terjadi pada rentang usia 65 tahun ke atas yaitu 9,5%.

Yang perlu diperhatikan juga adalah soal pemanfaatan media untuk mendulang popularitas. Popularitas, dalam hal ini (saya merujuk pada pendekatan *popular culture*) terkait segala hal yang dibesarkan oleh media. Itulah sebabnya, kita bisa membedakan pengaruh kiai pesantren dan "ustaz seleb" dari cara membesarkan pengaruhnya. Tanpa media, kiai pesantren punya banyak pengaruh di dunia nyata, tetapi "ustaz seleb" tak banyak pengaruhnya di dunia nyata tanpa bantuan media.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan demokrasi digital adalah aktor-aktor sosial dan budaya politik setempat. Penerapan teknologi informasi di satu sisi memungkinkan terjadinya perluasan partisipasi lewat komunikasi politik yang terjal. Tetapi di sisi lain kesuksesan penerapannya juga bergantung pada kapasitas pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan kemampuan negara untuk mengontrol keberadaan saluran demokrasi digital. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk dinamis yang merespon budaya demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap elemen diperlukan untuk mendukung keberadaan demokrasi digital demi mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.

MILENIAL SEBAGAI EKSEKUTOR EDUKASI PILKADA

Oleh: Selfia Ulfalaili

Pesta demokrasi tahun 2020 merupakan sarana masal dalam implementasi keberadaan demokrasi pilkada di Indonesia pada periode ini. Situasi dan kondisi dalam pelaksanaan pilkada periode ini sangat dipenuhi tantangan yaitu pandemi covid-19 yang tidak hanya melanda negara Indonesia tapi juga melanda dunia. Namun hal tersebut tak akan membuat kita gentar dan diam termangu dalam melaksanakan kontestasi pilkada selama menerapkan protokol kesehatan.

Penyebaran mengenai informasi akan dilaksanakannya pilkada dan kampanye juga menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan dari periode sebelumnya. Kini kita dituntut aktif dengan media sosial guna menyebar luaskan informasi. Karena di masa pandemi ini, kita dianjurkan untuk tidak berkumpul dan dianjurkan di rumah saja sebagaimana anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya disini kita dituntut untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada seperti menggunakan metode daring.

Sebagai kaum milenial kita memanfaatkan media sosial yang sangat strategis dalam mengatasi problema dilema tidak boleh berkumpul. Memaksimalkan media sosial sebagai sarana edukasi pilkada sangatlah perlu. Media sosial yang dapat diakses dimana saja dan siapa saja tentu menjadi sarana komunikasi dalam membangun interaksi dan penyebaran informasi terlebih mengenai pemilu yang dalam kontestasi pilkada periode ini menjadi isu panas. Pada era pemilu tahun lalu membuktikan bahwa media sosial memainkan peran yang berpengaruh dalam penggiringan dan pembentukan opini serta pemikiran publik.

Media sosial yang sangat bebas tanpa ada batasan, bahkan pemerintahpun tidak dapat membatasi hal itu tentu memiliki bobot informasi yang berbeda. Bahkan jika memasuki era pemilu maupun pilkada, informasi dan narasi yang cenderung menggiring ke arah negatif.

Oleh karena itu, perlu adanya edukasi mengenai bagaimana kita sebagai kaum milenialis menghadapi dan mengakali tentang sebuah demokrasi yang kebablasan tersebut. Termasuk juga bagaimana millenial menyebarluaskan informasi mengenai pilkada kepada khalayak yang tidak mengengerti tentang media sosial atau tidak memiliki sarana penunjang informasi digital yang memadai. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua tentang kondisi masyarakat kita yang sebagian masih kudet (Kurang Update).

Kita semua tidak menginginkan kendala mengenai penyebarannya informasi secara langsung membuat partisipatif masyarakat berkurang. Oleh karena itu kita harus siap menjadi sumber informasi bagi khalayak yang tidak kurang memiliki sarana penunjang daring tersebut. Perlu dicatat bahwa sebagai millenialis yang berintegritas dan akademisi tentu dalam penyebaran informasi harus mengetahui dasar reality informasi yang disampaikan sehingga tidak simpang siur, serta perlu adanya kreativitas dalam penyampaiannya guna menarik partisipati masyarakat agar turut andil dalam perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada tentu menjadi hal paling utama. Hal ini tentunya bukan hanya berkaitan dengan jalannya regenerasi kepemimpinan maupun kepentingan kesehatan. Tapi juga berkaitan dengan sebuah substansi yang sangat fundamental tentang arti “kelahiran pemimpin”, dimana meski pilkada dilaksanakan pada masa pandemi kita berharap hasil dari pilkada tersebut harus memiliki kualitas yang bagus.

Untuk memperoleh pemimpin yang bagus, tentu harus melewati kontestasi yang bagus pula. Maka kesadaran masyarakat dalam menilik track record dan mengetahui visi misi paslon menjadi hal utama untuk diketahui. Jadi kita perlu memaksimalkan media sosial guna memperoleh dan menyebarkan informasi yang valid dan baik pula. Karena pada dasarnya kualitas informasi yang disampaikan tergantung pada adminnya dan bagaimana strategi dalam penyampaian informasi yang dilakukannya.

MENAKAR IKLIM DEMOKRASI DIGITAL PADA PILKADA 2020

Oleh: Syaiful Al Islami

Perkembangan teknologi dan komunikasi mempengaruhi cara hidup manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan, tak dipungkiri perkembangan dan kemajuan teknologi juga berdampak besar terhadap sistem bernegara kita, yakni cara kita dalam melaksanakan proses demokrasi dewasa ini. Sejalan itu perkembangan media sosial akhir-akhir ini turut andil dalam menentukan kebijakan di negeri kita. Pengaruh media sosial yang begitu massif tentu menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat begitu besarnya kekuatan yang dimiliki dan banyaknya kelompok kepentingan yang memainkan peran aktif dalam media sosial.

Era digital bisa juga dikatakan dengan era globalisasi, adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena penukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan internet. Era digital merupakan suatu masa dimana sebagian besar masyarakat pada masa ini menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ungkapan yang kerap muncul dalam memonitor pelaku media sosial adalah, adanya istilah facebookers, twitterland, IG-ers, para pengguna media sosial ini ada yang menggunakan dalam hal positif untuk kepentingan yang baik, dan ada juga yang menggunakan media sosial untuk kepentingan negatif.

Menjelang masa pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, sudah marak pelaku media sosial melakukan aktifitas yang sifatnya memberikan dukungan kepada salah satu atau terhadap beberapa kandidat yang dimungkinkan menjadi peserta pada konstelasi Pemilihan Kepala Daerah yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020 di daerah masing-masing.

Pada tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah metode kampanye pemilu 2019, yaitu kampanye menggunakan media sosial. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilihan umum, yang isinya; “diperkenankan menggunakan media sosial sebagai metode kampanye. Dengan keluarnya peraturan tersebut tentu memberikan ruang bagi peserta pemilu untuk mensosialisasikan dirinya pada media sosial yang ada. Hal ini tentu akan menyasar generasi-generasi milenial terutama yang sering menggunakan beberapa media sosial yang trend. Bagaimanapun setiap kegiatan yang diatur dalam peraturan, akan ada human eror, sebab pelakunya adalah manusia, tentu harus ada yang melakukan pengawasan dan menfilter setiap postingan yang ada.

Penggunaan media sosial pastinya memberikan kontribusi, baik secara positif maupun secara negative terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, baik terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, baik bagi peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih. Maka untuk itu diharapkan kepada setiap individu yang menggunakan media sosial mampu menyaring informasi yang di dapat atau tidak gampang terbujuj kamufase berita-berita palsu yang menyesatkan. Penyalahgunaan media sosial dapat merubah prinsip-prinsip demokrasi, karena informasi yang tidak benar dan mudahnya

masyarakat terpengaruh dapat merubah kepribadian dari setiap individu yang menggunakannya.

Penyimpangan di media sosial, apalagi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Serentak tahun 2020 ini dapat mempengaruhi proses berdemokrasi dalam pelaksanaan Pilkada yang akan kita laksanakan, proses pencalonan sebentar lagi akan memasuki tahap pendaftaran ke KPUD masing-masing daerah yang akan melaksanakan pemilihan tahun 2020 ini.

Maka upaya pemerintahan dalam mengatasi penyimpangan bagi pengguna media sosial adalah membuat kebijakan atau aturan tentang penyalahgunaan media sosial, seperti UU-ITE, memerangi hoax, dan menuntut keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk bahu-membahu bersama pemerintah membangun kesadaran bersama, sehingga dapat memanfaatkan media sosial secara bertanggungjawab dengan konten-konten positif.

Bagaimana dan siapa yang berperan ketika penyimpangan penggunaan media sosial terjadi disaat atau sedang berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, tentu selain peran penegak hukum, ada unsur penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu yang tugas utamanya adalah mengawasi setiap tahapan pemilihan, dan kita sebagai masyarakat tentu ikut bersama berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini jauh dari propoganda dan berita-berita hoax di media sosial.

KOMBINASI PEMANTAUAN “UDARA” DAN “DARAT” DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA 2020

Oleh: Syauqi Faghra Ghiffari

Seiring dengan berkembangnya secara cepat teknologi informasi dari masa ke masa, yang ditandai dengan banyaknya platform media digital yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di dalam mendapatkan setiap informasi, dan bahkan hampir setiap orang pada masa kontemporer ini sudah mempunyai akses informasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini dunia dalam genggaman setiap orang mengingat begitu mudahnya akses setiap informasi untuk didapatkan secara aktual. Dengan mudahnya akses informasi yang didapatkan oleh setiap orang, tentu hal tersebut apabila dianalogikan seperti “dua mata pisau yang tajam”, artinya yang dapat dimaknai apabila pengguna dan menggunakannya secara positif maka akan mendapatkan hasil yang positif juga, sebaliknya apabila pengguna dan menggunakannya secara negatif maka akan menghasilkan berakibat negatif dan lebih berbahaya.

Mengingat saat ini media digital menjadi salah satu akses utama masyarakat dalam mendapatkan setiap informasi, bukannya tanpa alasan bahwa memang saat ini berdasarkan data mengenai penggunaan media digital berada pada angka 80% itu artinya mayoritas masyarakat sudah menjadi bagian dari konsumen “new media” yang dimana platform yang disediakan oleh media digital mampu memberikan ruang dan kesempatan bagi penggunanya untuk dapat berkomunikasi secara dua arah. Maksudnya, pengguna media digital tidak hanya dapat membaca informasi tersebut akan tetapi dapat memberikan tanggapan dan pemikirannya dalam ruang media digital tersebut.

Itulah mengapa pentingnya penggunaan media digital harus diiringi dengan pendidikan dan wawasan literasi digital terhadap para penggunanya, dalam rangka untuk menciptakan wawasan dan opini publik yang mampu memilah dan memilih antara informasi yang benar dan informasi yang tidak benar atau “hoax”. Masifnya nuansa informasi yang benar dan informasi yang tidak benar “hoax” tersebut biasanya selalu muncul menjelang terselenggaranya setiap kontestasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dampaknya masyarakat menjadi **skeptis** di dalam menerima dan mencerna setiap informasi tersebut sebelum informasi tersebut dapat dikonfirmasi kebenarannya. Akan tetapi tak dapat dipungkiri pula bahwa ada juga masyarakat yang dengan mudah menerima informasi tersebut tanpa terlebih dulu mengkonfirmasi kebenarannya, lebih berbahaya lagi jika masyarakat pengguna media digital tersebut hanya mampu menerima informasi dari satu sumber atau sudut pandang saja dan tidak mau mendengarkan atau menerima sudut pandang lainnya.

Apalagi saat ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 diselenggarakan pada saat pandemic covid-19 sedang berlangsung, maka kemudian dapat membuka ruang yang sangat luas dalam penyelenggaraan tahapan kampanye dan sosialisasi setiap kandidat dilakukan melalui penggunaan media digital atas dasar untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Dalam situasi inilah posisi masyarakat sebagai pemantau berjalannya tahapan pilkada hingga terselenggaranya pilkada tersebut dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan pemantauannya, dengan melalui media digital masyarakat yang telah memahami

dan mempunyai kapasitas dalam literasi digital diharapkan mampu menjadi bagian dari aktor terselenggaranya pilkada 2020, dengan memberikan penjelasan terkait informasi dan data yang benar dari setiap kandidat kepada keluarga, teman, maupun masyarakat lainnya sebagai upaya untuk mencegah dan melawan informasi yang tidak benar yang telah didapatkannya. Aksi tersebut dapat diinovasikan dengan terus memberikan produksi informasi yang benar kepada publik melalui “udara” dalam artian melalui media digital yang dikombinasikan dengan melalui darat yang dimaknai sebagai pemberian informasi secara langsung melalui dialog kepada pihak atau kelompok yang memang belum mampu mengakses informasi digital tersebut.

Kombinasi dan inovasi dalam rangka untuk memberikan kejelasan informasi dan data mengenai pilkada tersebut melalui udara dan darat dapat berjalan secara efektif apabila aksi tersebut dilakukan secara **konsisten** dan penuh komitmen bersama dalam rangka untuk menangkal informasi hoax.